

EDITORIAL

Antonius Steven Un

Refleksi Aktual

Pada tanggal 20 Oktober 2014 ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melantik Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Jusuf Kalla adalah mantan Wakil Presiden periode 2004-2009. Jadi, Jusuf Kalla adalah wajah lama dalam perpolitikan negeri ribuan pulau ini. Sementara itu, Joko Widodo adalah tokoh politik fenomenal di negara Pancasila ini. Betapa tidak, dalam kurun waktu tidak sampai tiga tahun (2012-2014), karir politiknya melejit dari seorang Walikota Surakarta menjadi Presiden Republik Indonesia. Ekspektasi kita terhadap Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih adalah mereka dapat mempertontonkan model kepemimpinan hamba. Model kepemimpinan inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Injil.

Dalam Markus 10:43, Tuhan Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu". Konteks dari teks ini adalah permintaan Yohanes dan Yakobus untuk mendapat posisi di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, ketika Ia berada dalam kemuliaan (ayat 37). William Lane menduga bahwa kedua murid yang dekat dengan Kristus itu beranggapan bahwa Kristus sebagai "*eschatological Lord*" akan pergi ke Yerusalem untuk memulihkan kemuliaan dari tahta

Daud yang telah hancur¹. Dengan kata lain, Yohanes dan Yakobus mengajukan permintaan dalam presaposisi “*royal messiahship*”². Permintaan kedua anak Zebedeus akan kemuliaan setelah Yesus menyampaikan prediksi penyalibannya (ayat 33-34) menandakan bahwa mereka tidak mengerti makna penderitaan Kristus. Permintaan mereka juga memicu kemarahan sepuluh murid lain. Tentu kesepuluh murid lain, termasuk di dalamnya Yudas Iskariot, merasa bahwa permintaan Yohanes dan Yakobus tidak mewakili aspirasi mereka. Kontestasi penuh ambisi sedang berlangsung. Orang-orang yang angkuh biasanya tidak menghendaki terdapat pribadi lain yang lebih angkuh dari mereka.

Dalam konteks sebagaimana dikemukakan di atas, kita kemudian mendengarkan *Verbum Christi* (firman Kristus) soal kepemimpinan hamba. Model kepemimpinan bangsa-bangsa adalah model dominatif dan penggunaan kuasa dan posisi untuk mencapai efisiensi dan efektifitasnya³. Dalam klasifikasi dikotomis, Tuhan Yesus jelas membuat antitesis yang tajam. Kepemimpinan yang dikehendaki-Nya bukanlah kepemimpinan tangan besi penuh kekerasan melainkan kepemimpinan hamba. James Edwards menggambarkan apa yang dibicarakan Kristus ini sebagai berikut,

¹ William Lane, *The Gospel of Mark* (Grand Rapids & Cambridge: William B. Eerdmans, 1974), 378.

² Lane, *The Gospel of Mark*, 379.

³ Bandingkan, James Edwards berkata, “*The world, says Jesus, practices leadership from a model of dominance, authority and the effective uses of power and position*”. Lihat Edwards, *The Gospel According to Mark* (Grand Rapids & Cambridge: William B. Eerdmans, 2002), 324.

"In a decisive reversal of values, Jesus speaks of greatness in service rather than greatness of power, prestige, and authority..."⁴. Edwards juga menggariskan penekanan *Verbum Christi* ini, yakni bukan pada kuasa dan kebebasan tetapi pada pelayanan, atau *diakonia*⁵.

Tuhan Yesus menggunakan dua kata benda di dalam teks ini yakni "*διακονος*" (ayat 43) dan "*δουλος*" (ayat 44)⁶. Kata yang pertama biasa diterjemahkan sebagai "pelayan" dan digambarkan dalam metafora seorang pelayan di meja makan. Ia sangat repot untuk mengurus begitu banyak hal. Sedangkan kata yang kedua biasa diterjemahkan sebagai "budak" dan menekankan esensi ketaatan. Kedua istilah ini membawa kita menjadi lebih jelas memahami model kepemimpinan hamba. Dalam konteks kepemimpinan politik, pemimpin negara adalah orang-orang yang bersedia repot untuk melayani kepentingan rakyat dan taat kepada Tuhan dan konstitusi yang merupakan aplikasi dari suara hati nurani rakyat. Dalam doktrin ekuitas John Calvin, konstitusi disusun berdasarkan hukum Taurat yang tertulis dalam hati nurani manusia⁷. Hal ini tentu menjadi jelas bila kita mengingat bahwa Rasul Paulus juga menggunakan kata "*διακονος*" untuk pemerintah dalam Roma 13:4.

⁴ Edwards, *The Gospel According to Mark*, 325-26.

⁵ Edwards, *The Gospel According to Mark*, 326.

⁶ Mengenai pembedaan ini, bisa lihat J. Knox Chamblin, *Paulus dan Diri: Ajaran Rasuli bagi Keutuhan Pribadi*, trans. Irwan Tjulianto & Elseye (Surabaya: Momentum, 2006), 139-67.

⁷ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill (Philadelphia: Westminster, 1960), IV.xx.15-16.

Sebelum kita berjalan lebih jauh, penulis memandang perlu menelaah apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Mantan Direktur Umum dari *Overseas Missionary Fellowship*, John Oswald Sanders merangkum sejumlah pengertian mengenai kepemimpinan. Sanders melihat esensi kepemimpinan bersifat teleologis. Karena itu, pengertian kepemimpinan yang dikutipnya adalah soal bagaimana seorang pemimpin mengarahkan orang-orang yang dipimpinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan tidak terutama bersoal tentang epistemologi tujuan tetapi proses pencapaian tujuan. Karena itu, kepemimpinan bersifat praktis-teleologis. Sanders sendiri memahami kepemimpinan sebagai “kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain untuk mengikuti pimpinannya”⁸. Inventarisasi yang dilakukan Sanders antara lain dimensi konsolidatif dan motivatif dari Bernard Montgomery; dimensi keteladanan dari John R. Mott; dan dimensi transformatif dari mantan Presiden Amerika Serikat Harry Truman (1945-1953)⁹. Dimensi yang pertama adalah bersoal tentang bagaimana seorang pemimpin mengumpulkan orang-orang, mengonsolidasikan dan mengorganisasikan mereka dan mendorong timbulnya keyakinan untuk mencapai tujuan. Dimensi kedua berfokus pada bagaimana seorang pemimpin terlebih dahulu menemukan jalan yang benar dan kemudian berada di depan

⁸ John Oswald Sanders, *Kepemimpinan Rohani*, trans. Jennifer E. Silas (Batam: Gospel, 2002), 35.

⁹ Sanders, *Kepemimpinan Rohani*, 35-37.

menarik para pengikutnya. Dimensi ketiga memunculkan pemimpin sebagai orang yang berkuasa transformatif, merubah pengikutnya dari sikap enggan menjadi bersikap rela menjalankan perintah guna mencapai tujuan tertentu.

Pada tataran ini, tidak bisa tidak, lokus kepemimpinan terdapat pada kepemilikan dan penggunaan kuasa. Filsuf Jürgen Habermas membandingkan konsep kuasa Max Weber yang sudah mapan dan gagasan Hannah Arendt yang baru dan menggugat¹⁰. Bagi Weber, kuasa adalah soal bagaimana memengaruhi orang lain untuk menerima dan melakukan apa yang diinginkan. Sebaliknya Arendt melihat bahwa kuasa adalah kapasitas untuk memberikan persetujuan di dalam konteks komunikasi nir-kekerasan. Weber menggunakan model teleologis di mana individu atau kelompok terlebih dahulu menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian menggumulkan sarana atau pendekatan yang tepat untuk merealisasikan tujuan tersebut. Keberhasilan dari tindakan tersebut sangat bergantung kepada kondisi-kondisi penunjang. Habermas menyebut kuasa model ini sebagai kuasa manipulatif. Sebaliknya, Arendt menyebut kuasa Weberian ini sebagai “kekerasan” (*violence*). Sebagai agen rasional bertujuan, yang secara eksklusif menginginkan kesuksesan dari aksi, agen tersebut bisa saja menggunakan kekuatan koersif untuk menekan subyek pengambil keputusan. Kuasa model Weberian berkaitan dengan kesempatan untuk menegaskan

¹⁰ Seksi ini disadur dan dikembangkan dari Jürgen Habermas, *Philosophical-Political Profiles*, trans. Frederick G. Lawrence (Cambridge & Malden: Polity, 2012), 171-87.

kehendak seseorang bahkan di tengah perlawanan.

Secara terbalik, Arendt melihat bahwa kuasa bukan hanya berkaitan dengan abilitas manusia untuk bertindak tetapi bertindak dalam konteks pluralitas. Arendt berpandangan bahwa fenomena dasar bukanlah bagaimana menginstrumentalisasi kehendak seseorang untuk mencapai tujuan orang lain tetapi bagaimana membentuk kehendak bersama dalam komunikasi yang bertujuan untuk mengalami kesepakatan. Arendt, dalam pandangan Habermas, sangat berhati-hati dan sensitif terhadap manipulasi, koersi, dan instrumentalisasi sumber daya seseorang untuk mencapai kehendak para pemimpin. Apa yang ingin dicapai adalah kehendak masyarakat secara kolektif yang diartikulasikan melalui komunikasi tak terdistorsi Habermasian dan/atau komunikasi tanpa tekanan versi Arendt. Model kuasa komunikatif yang digagas Arendt berfokus pada persetujuan dalam komunikasi intersubjektif dan bukannya pada kesuksesan tujuan seperti yang digagas dalam model kuasa teleologis. Di sini, Habermas melihat bahwa model kuasa komunikatif menggunakan bahasa bukan melalui jalan "*perlocutionary*" di mana bahasa digunakan untuk menghasut tindakan yang diinginkan pada subyek lain; melainkan melalui jalan "*illocutionary*" yakni bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi intersubjektif nir-kekerasan dan nir-koersi.

Terlepas dari kritikan Habermas terhadap gagasan kuasa Arendt, tetapi sumbangan Arendt di sini adalah menggugat konsep kuasa dan juga konsep kepemimpinan *a la* Weberian yang

dianggapnya sebagai kekerasan. Konsep kepemimpinan juga konsep kuasa sebagaimana diinventarisir oleh Sanders di atas dapat dianggap sebagai konsep kepemimpinan Weberian yang mengandung potensi kekerasan. Solusi dari kesulitan ini adalah bahwa pada satu sisi, model kepemimpinan hamba tetap harus mempertahankan otoritas sementara di sisi lain, pendekatan pengorbanan dan keteladanan harus dikedepankan. Tanpa otoritas, model kepemimpinan hamba akan kehilangan naturnya dan kelompok/ organisasi yang dipimpin akan menjadi liar. Namun demikian, tanpa keteladanan dan pengorbanan, model kepemimpinan hamba akan berubah menjadi kekerasan sebagaimana digugat oleh Arendt. Keteladanan merangkai kembali disintegrasi antara “telinga” dan “mata” pengikut. Tanpa keteladanan, terjadi konflik antara “mata” (baca: kesaksian yang dilihat oleh pengikut) dan “telinga” (baca: perintah yang didengar oleh pengikut).

Dalam konteks sukseksi kepemimpinan nasional tahun ini, otoritas yang dimaksudkan adalah supremasi hukum dan *law enforcement*. Supremasi hukum dilaksanakan antara lain berupa penegakkan hukum, penggalakan pemberantasan korupsi dan penertiban organisasi-organisasi masyarakat yang anarkis. Sementara keteladanan dan pengorbanan dinyatakan berupa kesederhanaan model kehidupan para pemimpin negara, pengutamakan kinerja dibandingkan tuntutan fasilitas dan lain sebagainya.

Edisi Oktober 2014

Jurnal edisi ini dibuka dengan sebuah *scholar's reflection* tentang Alkitab sebagai firman Allah. Pemaparan Gerald Bray atas natur Alkitab menghasilkan implikasi hermeneutika tertentu. Dari Bibliologi, pembaca disuguhkan penelaahan teknis doktrin Kovenan Kerja. Suatu tinjauan historis-teologis yang hati-hati dan teliti ditulis oleh Ranjawali N. Matalu. Ia memaparkan titik krisis sikap teologi para teolog Reformed soal Kovenan Kerja dan membela keberadaannya serta mengartikulasikan implikasi doktrinalnya.

Terdapat dua artikel mengenai relasi iman dan ilmu/akal. Yang pertama, ditulis oleh Peter Lillback. Presiden Westminster Theological Seminary ini menulis relasi iman dan akal dalam konteks teologi Yohanes, guna membela signifikansi apologetika presuposisional. Sementara itu, mahasiswa doktoral pada kampus di Philadelphia, USA ini, David Tong menulis tentang pergulatan kaum Neo-Calvinis Belanda menghadapi *worldview* Darwinisme dan produk filosofis-sainsnya, evolusi. Teolog-teolog Neo-Calvinis yang lebih awal menerima evolusi meski menolak Darwinisme. Meski demikian, teolog-teolog Neo-Calvinis kemudian membuat suatu ketidaksinambungan dalam posisi teologis yang berbeda.

Jurnal ini ditutup dengan dua artikel teologis-filosofis. Jadi S. Lima menelaah konsep perjanjian dan pengampunan menurut filsuf Jerman, Hannah Arendt dalam mengantisipasi kesulitan ketaktentuan tindakan dan ketakterulangannya. Jimmy Pardede menutup jurnal edisi ini dengan sebuah studi komparatif pemikiran

Georg Hegel dan Jonathan Edwards tentang relasi Allah dan Seni. Tesisnya adalah manusia sulit mendapatkan kepuasan sejati dalam seni – sebagaimana dalam rancangan Allah – bila seni tidak dijangkarkan kepada Allah sendiri.